

Analisis Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Sekapuk

Nadia Mar'atus Sholihah¹, Bambang Kusbandrijo²

Email : nadiamaratussholihah@gmail.com

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

Abstract

Tourism village is a community or society consisting of population in limited area can be interact with each other under management and have concern and awareness to role together in according with their skills and abilities. In the regional regulation of Gresik regency No. 16 in 2013 about master plan for tourism development of Gresik regency in 2013-2025 government of Gresik wants to create a tourism industry can move economy of the area through increased investment in tourism, cooperation of tourism, extending employment and support environmental conservation and community empowerment. The role of Sekapuk village enterprises (BUMDes) as the main manager of SETIGI Tourism very big impact for economic development of people in the village. In this research, authors used a qualitative method by descriptive approach by observing village enterprises (BUMDes) as the manager tourism and also villager who works in the SETIGI tourism.

Keywords : *Tourism, Tourism Village, Village Enterprises (BUMDes), Sekapuk Village.*

Abstrak

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung dibawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai ketrampilan dan kemampuan masing-masing, Seperti halnya dikutip di Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 pemerintah kabupaten gresik ingin mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan Perekonomian Daerah melalui peningkatan

investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Peran Badan Usaha Milik Desa Sekapuk sebagai pengelola utama wisata setigi sangatlah berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat desa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan Badan Usaha Milik Desa Sekapuk selaku pihak pengelola wisata dan juga masyarakat desa yang berperan sebagai karyawan/pekerja di wisata setigi.

Kata kunci : *Pariwisata, Desa Wisata, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Sekapuk*

1. Pendahuluan

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mulai diperhitungkan atau diperhatikan di berbagai negara baik negara maju ataupun negara sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan didukung oleh sumber daya alam dan budaya yang beragam sangat potensial untuk diolah dan dimanfaatkan. Dari sumber daya alam yang ada, pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang sangat layak untuk dikelola dan dikembangkan secara maksimal. Seperti halnya dikutip di Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 – 2025 “mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan Perekonomian Daerah melalui peningkatan investasi dibidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat”. Di Kabupaten Gresik sendiri merupakan wilayah yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Selain fakta tersebut, ternyata Kabupaten Gresik juga menyimpan potensi alam yang sangat menawan, baik dataran tingginya maupun keindahan pantainya. Apa saja tempat wisata yang cukup terkenal di Gresik diantaranya ada : wisata religi sunan giri, wisata pantai delegan, wisata pulau bawean, wisata bukit kapur setigi (Jannah, 2019). Kabupaten Gresik di bagian utara banyak terdapat pegunungan kapur yang cukup panjang. Selain dimanfaatkan sebagai tambang batu kapur, ada pula yang dijadikan obyek wisata yang dikenal dengan nama ‘Wisata Setigi’.Wisata Bukit Kapur (SETIGI) dibangun pemerintah Desa Sekapuk dalam upaya pelestarian lokasi bekas galian tambang batu kapur tersebut. Jika tidak ada upaya pencegahan atau pelestarian seperti ini, maka Desa Sekapuk akan kehilangan kekayaan alam tersebut. Wisata ini terletak di Desa Sekapuk, yang terletak di Kecamatan Ujungpangkah. Desa sekapuk memiliki luas wilayah kurang lebih 2.97Km², penduduk di Desa Sekapuk berjumlah ±4913. Sebelum dibukanya wisata setigi yang di kelola oleh Badan Usaha Milik Desa, mayoritas mata pencaharian penduduk Sekapuk adalah penambang bukit kapur untuk dijadikan bata putih yang presentasi kecelakaannya sangat besar dan penghasilannya sangatlah kecil. Dari namanya, wisata ini menawarkan Selo (bebatuan), Tirta (Air) dan Giri (gunung). Di wisata tersebut banyak wahananya. Mulai dari Pahatan Gerbang Ghoib, Patung Semar, Jembatan Peradaban, Candi Topeng Nusantara, Miniatur Masjid Persia,

Air Terjun, Telaga Warna, Nogo Giri Pancoran, dan masih banyak lainnya. Tempat wisata ini, dulunya merupakan tempat warga membuang sampah, dari 2003 hingga 2017. Tapi mulai 2018 warga Desa Sekapuk membersihkan sampah, karena warga sadar tempat ini cocok digunakan untuk tempat wisata. Dalam lahan seluas 1,5 hektar yang disiapkan, obyek wisata yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa Sekapuk ini bakal menyuguhkan beberapa tawaran kepada para pengunjung. Disamping sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengelolaan obyek wisata diantaranya pemandu wisata, penyedia jasa penyebrangan menggunakan perahu, dan juga mendirikan warung-warung yang menyediakan berbagai makanan khas Gresik. Wisata Bukit Kapur (SETIGI) mulai dikunjungi masyarakat sejak 2018 Kemudian Pemerintah Desa meresmikan dan melakukan grand opening pada wisata tersebut pada tanggal 01 Januari 2020 oleh Kepala Desa Sekapuk. Wisata alam bukit kapur setigi ini terdiri dari hamparan bukit kapur yang membentuk mulai dari danau buatan beserta jembatan, rumah honai Papua, wahana wisata air, spot foto, dinding topeng, hingga gunung kapur bekas tambang yang terlihat indah

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Delmira Syafrini,dkk (2016), Hasil penelitian ini adalah Bahwa pergeseran kebijakan Kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya berhasil mengubah wajah Kota Sawahlunto saat ini, sekaligus membangkitkan kembali perekonomian kota yang sempat mati suri (Syafrini & Fernandes, 2018).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yulianus Nardin (2016), Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada Program Badan Usaha Milik Desa. Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu sesuai dengan program strategi pemberdayaan yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat guna belum sepenuhnya berjalan efektif, dikarenakan pada Proses pengembangan kelembagaan kelompok yaitu masih dalam proses transisi perbaikan, dalam hal ini pertanian hydroponic mengalami kemacetan pada staf khusus pengelola, yang mengakibatkan pertanian hydroponic tidak terawat (Nardin, 2019).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Achmad Nur Yachya, Dkk, Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan CBT dikawasan wisata Pantai Clungup sudah baik, penerapan CBT terlihat dari partisipasi anggota kelompok dalam semua aspek, peningkatan kualitas hidup anggota kelompok, keberlanjutan lingkungan (Yachya, n.d.).

2. Metode

2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini, diantaranya

2.1.1 Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Wisata Bukit Kapur Setigi di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dan Badan Usaha Milik Desa Sekapuk yang bertanggung jawab untuk mengelola Wisata Bukit Kapur di Desa Sekapuk.

2.1.2 Data Penelitian

Data yang Mendukung dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah segala informasi kunci yang didapat dari informan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hali ini peneliti mengambil data pimer dari informan yaitu :

- a. Kepala Desa
- b. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beserta anggota
- c. Masyarakat (karyawan) yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Bukit Kapur Setigi

b. Data Sekunder

Data skunder adalah pengolahan data yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu mengolah data dengan lebih banyak mengumpulkan data dan menguraikannya secara menyeluruh dan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga akan diperoleh suatu

hasil dari pengolahan data yang disebut hasil penelitian. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer yang berupa bukti dokumentasi, catatan maupun dokumen-dokumen lainnya.

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menguraikan keterangan yang telah diperoleh agar informasi tersebut dapat dipahami oleh peneliti dan juga dipahami oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian ini. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

2.2.1 Reduksi Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

2.2.2 Penyajian Data

Penyajian data ini peneliti melakukan penyajian dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data bertujuan agar penulis dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

2.2.3 Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah verifikasi. Dari awal pendataan, peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung, akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat didukung oleh data yang

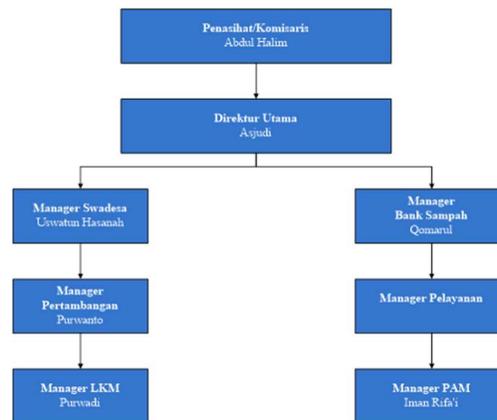
valid dan konsisten yang ditemukan peneliti di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

3. Hasil

Badan usaha milik desa yang sering disebut BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa Sekapuk dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa Sekapuk dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa Sekapuk. Begitupun peran Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan dan pembangunan Wisata Bukit Kapur (SETIGI). Selain sebagai sumber dana untuk wisata, Badan Usaha Milik Desa Desa Sekapuk juga berperan sebagai pengelola utama Wisata Bukit SETGI.

Badan Usaha Milik Desa Sekapuk memiliki struktur organisasi untuk memaksimalkan kinerja Badan Usaha Milik Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Sekapuk

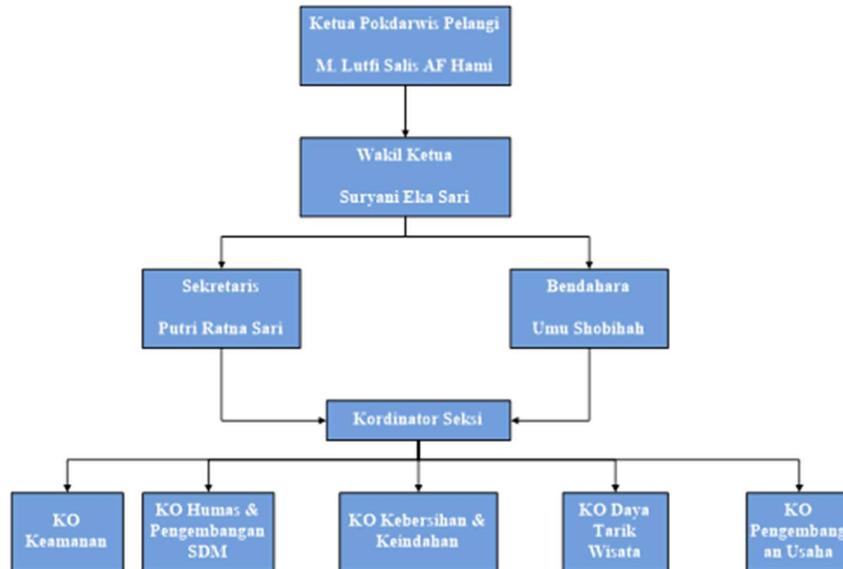


Sumber : Penulis 2020

Badan Usaha Milik Desa Sekapuk dalam pengelolaan Wisata Bukit Kapur Setigi membentuk sebuah organisasi yang bernama *Pokdarwis Pelangi Desa Sekapuk*. Organisasi Pokdarwis Pelangi merupakan singkatan dari *Kelompok Sadar Wisata*. Pokdarwis Pelangi dibentuk oleh Kepala Desa Sekapuk pada tahun 2018 di Desa Sekapuk Kabupaten Gresik. Organisasi ini menghimpun pemuda-pemudi warga Desa Sekapuk yang berminat secara sukarela dalam pengembangan dan pelestarian wisata yang dimiliki oleh Desa Sekapuk yaitu wisata bukit kapur setigi.

Pokdarwis Pelangi Desa Sekapuk memiliki struktur organisasi, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2 Struktur Organisasi POKDARWIS Pelangi



Sumber : Penulis 2020

4. Pembahasan

Wisata bukit kapur (SETIGI) dibangun dengan tujuan untuk melestarikan keberadaan perbukitan kapur yang sudah semakin habis kondisi fisiknya oleh aktifitas pertambangan yang dilakukan sejak 1962 sampai sekarang. Dengan faktor tersebut pemerintah Desa Sekapuk memutuskan untuk mengambil alih sebagian lahan yang dulunya dikelola oleh PT.POLOWIJO GOSARI untuk dikelola oleh pemerintah daerah Sekapuk untuk dijadikan sebagai obyek wisata alam penghijauan yang bertema keluarga. Dengan dibangunnya wisata Bukit Kapur (SETIGI) ini.

Dalam pengelolaan wisata ini ada perbedaan kewenangan antara pemerintah Desa dengan BUMDes. Berikut dijelaskan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perbandingan Kewenangan Pemerintah Desa & BUMDes Sekapuk

No.	Kewenangan Pemerintah Desa	Kewenangan BUMDes
1	perencanaan dan pengendalian pembangunan	perencanaan dan pengendalian pembangunan
2	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang	perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang
3	penyedia sarana dan prasarana umum	pengelola sarana dan prasarana umum
4	penyedia fasilitas pengembangan wisata	pengembangan dan pengelolaan wisata
5	penyedia fasilitas ekonomi kerakyatan	pengembangan ekonomi kerakyatan
6	pengendalian lingkungan hidup	pengendalian lingkungan hidup

Sumber : Peneliti 2020

Bedasarkan tabel 4.1 diatas, adanya perbedaan kewenangan antara Pemerintahan Desa Sekapuk dengan BUMDes Sekapuk, untuk itu setiap jajaran stakeholder hendaknya selalu memperkuat setiap kelembagaan agar terjadi kesenjangan.

Sejak awal perencanaan pembangunan Wisata Bukit Kapur Setigi pemerintahan Desa Sekapuk membuat program Desa mandiri yang bertujuan untuk memperkuat Ekonomi Kerakyatan. Alasan pemerintah desa merencanakan pembangunan Wisata Bukit Kapur Setigi karena beberapa permasalahan yang terjadi di Desa Sekapuk. Beberapa isu atau permasalahan yang peneliti temui dilapangan yakni seperti pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Permasalahan Di Desa Sekapuk

No.	Permasalahan	Perkembangan	Solusi
1	Kesejahteraan belum tercapai	Semakin bertambahnya penduduk menjadikan angka pengangguran semakin besar	Meningkatkan kualitas SDM sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri

2	Sarana prasarana yang kurang memadai	Pembangunan sarana prasarana yang belum 100%	Mengembangkan dana desa di sektor usaha lain untuk memaksimalkan fasilitas wisata
3	Kebijakan pendanaan wisata yang kurang sesuai	Kebijakan pembangunan wisata tidak sejalan dengan Pendapatan Asli Desa (PAD)	Membuat kebijakan tentang tabungan investasi untuk masyarakat sehingga masyarakat ikut serta dalam pembangunan wisata
4	Belum adanya SOP khusus yang mengatur pengelolaan Wisata Setigi	Kebijakan Wisata yang masih mengacu pada Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisataan Desa Sekapuk”	Penerbitan SOP/Kebijakan yang Khusus mengatur pengelolaan Wisata Setigi

Sumber : Peneliti 2020

Bedasarkan tabel 4.2 diatas, beberapa isu permasalahan kebijakan pengelolaan wisata yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan hasil dari temuan dilapangan saat peneliti melakukan observasi. Permasalahan yang terjadi saat ini dikarenakan program yang dibuat oleh pemerintah desa sebelumnya masih belum optimal, sehingga menimbulkan berbagai masalah di Desa Sekapuk. Untuk itu peneliti tertarik untuk menganalisis Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk dengan menggunakan model analisis kebijakan publik menurut Dunn (Dunn, 2003).

Dalam konsep kebijakan ada tahapan dimana tahapan disebut analisis kebijakan. Analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual dan praktis yang di tujukan untuk menciptakan, menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan sebelum atau sesudah kebijakan itu dibuat. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn ada lima (5) langkah yang harus dilakukan yaitu : Pencarian masalah, Peramalan Masa depan (Forecasting), Rekomendasi Kebijakan, Pemantauan Hasil Kebijakan, Evaluasi Kebijakan. Namun dalam penelitian ini peneliti memakai tiga (3) langkah, yaitu:

1. Merumuskan masalah, dalam analisis kebijakan masalah adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum dapat terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki melalui tindakan publik.

2. Rekomendasi kebijakan yakni menghasilkan informasi tentang kemungkinan aksi/tindakan di masa yang akan datang.
3. Pemantauan hasil kebijakan, pemantauan sering disebut monitoring yang merupakan prosedur yang digunakan untuk memberikan informasi sebab akibat saat kebijakan dilaksanakan.

Pada tahap pertama yaitu merumuskan masalah, pada tahap ini Pemerintah Desa Sekapuk telah banyak bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk mengumpulkan masalah apa saja yang terjadi dalam pengelolaan Wisata Setigi, selanjutnya akan dilakukan kajian mendalam dan dibahas dalam Musrembang Desa yang diadakan di setiap tahunnya.

Bedasarkan temuan lapangan bahwa ada beberapa permasalahan di wisata setigi yang masih belum dapat diselesaikan, seperti masalah pendanaan, pemanfaatan SDM yang belum maksimal, pengerjaan sarana prasarana wisata yang masih belum 100%. Secara umum permasalahan tersebut antara lain disebabkan karena pendanaan wisata tidak menggunakan dana dari investor luar. Dalam hal ini pendanaan yang masih memanfaatkan dana Pendapatan Asli Desa dan swadaya masyarakat.

Langkah selanjutnya yaitu rekomendasi kebijakan, dalam hasil observasi peneliti dilapangan dalam Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tentang Pengelolaan Wisata Setigi untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk ada beberapa usulan alternatif untuk dijadikan rekomendasi kebijakan dalam pengelolaan Wisata Setigi untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk dengan dibentuk Pola Partnership atau kerjasama dengan pihak luar diasumsikan lebih bisa bekerja positif dalam mengelola pelayanan wisata.

Dengan uang yang dihasilkan, partnership dianggap cocok bagi pemerintah desa karena orientasi keberhasilannya ditentukan oleh besarnya kontribusi yang diberikan. Ini sesuai dengan permintaan pemerintah desa yang berusaha memperbaiki pelayanan dan dapat menghasilkan uang untuk pembangunan desa maupun objek wisata.

Langkah selanjutnya yaitu atau pemantauan hasil kebijakan, dalam pemantauan hasil kebijakan pengelolaan Wisata Setigi dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya yang pertama dilakukan ditingkat pemerintahan desa. Melalui pemantauan dari pemerintahan desa diharapkan nantinya seluruh stakeholder dapat melaksanakan pengelolaan Wisata Setigi sesuai rencana induk yang telah disepakati dengan target dan sasaran yang tepat. Selain pemantauan oleh pemerintah desa, pemantauan kebijakan ini dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam menilai segala program pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan. Masyarakat berhak berperan dalam pengelolaan Wisata Setig. Peranserta masyarakat sebagaimana dilakukan pada tahap perencanaan sampai pemantauan terhadap program pembangunan yang direncanakan.

5. Kesimpulan

Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, dalam Analisis Kebijakan BUMDes Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk masih belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hal yang belum dapat diselesaikan. Pertama, Dalam pengelolaan wisata setigi belum diterbitkan kebijakan khusus dan hanya mengacu Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisataaan Desa Sekapuk”. Kedua, pembangunan sarana prasarana wisata yang belum 100%. Permasalahan ini akan membuat pengelolaan wisata tersebut tidak maksimal.

Kemudian pada tahapan rekomendasi kebijakan, dari berbagai kebijakan yang ditawarkan diharapkan mampu menjadi solusi untuk menangani masalah dalam pengelolaan Wisata Setigi. Akan tetapi, rekomendasi tersebut belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum adanya persetujuan oleh seluruh stakeholder. Hal tersebut menyebabkan berbagai rekomendasi kebijakan belum dapat dilaksanakan. Pada pemantauan hasil kebijakan, pada tahapan pemantauan kebijakan atau monitoring ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Sekapuk dan BUMDes Sekapuk melainkan dalam pemantauan kebijakan ini masyarakat juga diikutsertakan dalam menilai dan mengawasi selama pembangunan Wisata Setigi.

Dari faktor penghambat terkait pendanaan pengelola wisata yang masih mengandalkan dana Pendapatan Asli Desa (PAD) dan juga investor dari dalam desa. Untuk saat ini Desa Sekapuk sudah beberapa kali menolak bantuan dari luar seperti Sponsor dari perusahaan karena Pemerintah Desa Sekapuk mempunyai Visi dan Misi menjadikan Desa Sekapuk menjadi desa mandiri.

Selanjutnya untuk faktor pendukung terkait pendanaan objek Wisata Setigi dikarenakan masyarakat Desa Sekapuk sadar akan pentingnya menjaga dan mengelola potensi Sumber Daya Alam, sehingga dalam pendanaan objek wisata masyarakat juga terlibat sebagai investor yang ikut serta memberikan suntikan dana untuk perawatan serta pembangunan objek Wisata Setigi.

6. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dalam Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Tentang Pengelolaan Wisata Setigi Untuk Perkembangan Ekonomi Masyarakat, adapun saran tersebut sebagai berikut :

- a. Badan Usaha Milik Desa Sebagai pihak pengelola utama dalam wisata setigi perlu meningkatkan kordinasi dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan Wisata Setigi.
- b. Perlu adanya penanganan serius dari seluruh stakeholder dalam menangani berbagai masalah yang saat ini terjadi, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, dengan cara diterbitkannya SOP pengelolaan Wisata Setigi sehingga tidak hanya terpaku dalam Peraturan Desa Sekapuk Nomor 06 Tahun 2018 Tentang “Rencana Pembangunan Kepariwisataan Desa Sekapuk”.
- c. Untuk mengatasi masalah pendanaan, Badan Usaha Milik Desa Sekapuk Selaku pihak pengelola perlu menjaring investor luar, dan tidak sepenuhnya menggunakan Pendapatan Asli Desa(PAD) agar pembangunan wisata dapat terlaksana secara maksimal.
- d. Perlu adanya pengembangan potensi SDM, sehingga dapat menciptakan produk-produk unggulan desa yang dapat dipromosikan di dalam Wisata.

- e. POKDARWIS PELANGI perlu mengembangkan diri, sehingga seluruh anggota dapat menguasai materi mengenai Wisata Setigi dan juga dapat memberikan inovasi-inovasi di dalam Wisata Setigi

Daftar Pustaka

- Jannah, U. (2019). *Strategi bauran komunikasi pemasaran obyek wisata baru (studi deskriptif wisata bukit kapur setigi di desa sekapuk kecamatan ujungpangkah kabupaten gresik)*.
- Mandira, R. G., & Atmadja, A. T. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1 of 10.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program Badan Usaha Milik Desa. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 140–145.
- Syafrini, D., & Fernandes, R. (2018). Dampak Pergeseran Kebijakan Kota Tambang Menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya Pada Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kota Sawahlunto. *Socius*, 4(2), 74. <https://doi.org/10.24036/scs.v4i2.23>
- Yachya, A. N. (n.d.). *PENGELOLAAN KAWASAN WISATA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS CBT (COMMUNITY BASED TOURISM) (Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang)*. 39(2), 107–116.